

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

2.1. Visi Dan Misi

Tahun 2016 merupakan tahun kedua kepemimpinan Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018, dengan rencana kerja tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018. Periode ini merupakan tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Pelaksanaan pembangunan pada periode kedua merupakan upaya mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 dengan fokus pada pemerataan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, dan visinya adalah:

"Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua":

Penjabaran dan makna Visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Maju** : Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.
- Sejahtera** : Adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.
- Untuk Semua** : Adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat.

Dengan memperhatikan berbagai isu strategis pembangunan Jawa Barat yang mencakup permasalahan, tantangan, peluang dan ancaman, maka dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

Misi Pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Tujuannya adalah membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang menguasai IPTEK, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata;

2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata;
3. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK;
4. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga.

Misi Kedua, Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan, dengan tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur;
2. Meningkatnya daya saing usaha pertanian;
3. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi;
4. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan;
5. Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional.

Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas birokrasi yang profesional dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan partisipatif, dengan sasarannya adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik;
2. Terwujudnya pemerintahan yang modern, dengan sasaran meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis IPTEK;
3. Terwujudnya profesionalisme pemerintahan yang didukung oleh aparatur yang kompeten dengan sasaran meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur;
4. Meningkatkan stabilitas di daerah dengan sasaran meningkatnya stabilitas, ketertiban ketentraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum.

Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan, dengan sasaran meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana;
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas ekonomi, dan pelayanan dasar, dengan sasaran; pertama, meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat, dan kedua, meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olahraga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesejahteraan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan sasaran Pencegahan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olahraga, dengan sasaran meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olahraga serta penanganan komunitas tertentu;
3. Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing, dengan sasaran meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olahraga, seni, budaya dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar manusia, dengan sasaran meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama.

Untuk mendukung tujuan dan strategi di atas, maka kebijakan umum pembangunan Jawa Barat Tahun 2016 diarahkan untuk :

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing, yang diselenggarakan melalui kebijakan optimalisasi kualitas dan sebaran layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia Jawa Barat;
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan, yang diselenggarakan melalui kebijakan pengembangan kemampuan dan daya saing ekonomi Jawa Barat berbasis potensi lokal;
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi publik, yang diselenggarakan melalui kebijakan penyelenggaraan good governance yang bermutu, akuntabel, toleran dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan, yang diselenggarakan melalui kebijakan optimalisasi kuantitas, kualitas dan pelayanan infrastruktur wilayah serta pengendalian tata ruang berbasis daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana serta peningkatan penciptaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
5. Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, seni, budaya dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal, yang diselenggarakan melalui kebijakan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbasis potensi lokal.

Dalam rangka mengukur kinerja penyelenggaraan arah kebijakan umum pembangunan Jawa Barat, maka ditetapkan berbagai indikator kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Indikator kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang dimaksud mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu: 1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, 2) Aspek Pelayanan Umum, 3) Aspek Daya Saing Daerah. Dalam tiap-tiap aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan terdiri atas beberapa bidang urusan indikator kinerja pembangunan daerah.

Pertama, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, terdiri atas beberapa bidang urusan indikator kinerja pembangunan daerah, yaitu : Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sosial, Pertanian, dan Ketahanan Pangan; Kedua, Aspek Pelayanan Umum, terdiri atas beberapa bidang urusan indikator kinerja pembangunan daerah, yaitu : Pendidikan, Sosial, Koperasi dan UMKM, Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Ketiga, Aspek Daya Saing Daerah, terdiri atas beberapa bidang urusan indikator kinerja pembangunan daerah, yaitu : Kemampuan Ekonomi, Penanaman Modal, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Kependudukan dan Cacatan Sipil, Ketransmigrasian, Keagamaan, Perpustakaan, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan, Industri, Perdagangan, Perhubungan, Perumahan, Komunikasi dan Informatika, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemberdayaan desa, Statistik dan Kearsipan.

Selanjutnya pada masing-masing bidang urusan, indikator kinerja pembangunan daerah terdiri atas beberapa komponen indikator kinerja pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan terdapat 95 (sembilan puluh lima) komponen indikator kinerja pembangunan daerah, yang mencakup 18 (delapan belas) komponen indikator kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat, 27 (dua puluh tujuh) komponen indikator kinerja pembangunan daerah pada aspek pelayanan umum dan 50 (lima puluh) komponen indikator kinerja pembangunan daerah pada aspek daya saing daerah. Masing-masing komponen indikator kinerja pembangunan daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat disajikan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi Jawa Barat

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016			
		TARGET		CAPAIAN	TARGET		CAPAIAN	
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
Daya Beli Masyarakat	ribu rupiah	650	9.538.926- 9.607.470	9,778	655	9.610.827 - 9.781.956	9,797	
PDRB Per Kapita (ADHB)	juta rupiah	22.00 - 24.00		32.65 (32.64)		24,00 -26,00		34,88
PDRB Per Kapita (ADHK)	juta rupiah	9.50 - 11.00		25.84		11,00 - 13,00		26,92
Indeks Gini	Poin	0.37 - 0.36		0.41		0,36 - 0,35		0.41
Kesehatan								
Indeks Kesehatan	Poin	76.53	80.80-81.97	80.63	77.00	81.17 - 82.74	81.05	
AHH (Angka Harapan Hidup)	Tahun	70.00- 70.25	72.52-73.28	72.41	70,5 - 71,0	72.76 - 73.78	72.68	
Pertanian								
Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	111 - 112		105.06		112 - 113		104.84
Tingkat Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan sebesar	%	2.2		2.20		N/A		
Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Pertanian*	Buah	305			415			
Ketahanan Pangan								
Skor Pola Pangan Harapan	poin	76		78.3		78.0		
Pencetakan Sawah Baru	Ha	25		0		50		
Fokus Kesejahteraan Sosial								
Ketenagakerjaan								
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	65.00 - 66.00		60.34		66 - 67		60.65
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8.00 - 7.50		8.72		7,5-7,00		8.89
Sosial								
Angka Kemiskinan	Persen	6.80 - 5.90		9.57		5,90 - 5,00		8.77
2. ASPEK PELAYANAN UMUM								
Fokus Pelayanan Urusan Wajib								
Pendidikan								
Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74.75 - 75.50	69.36-69.86	69.50	75,50 - 76,00	69.56 - 70.91	70.19	
Indeks Pendidikan	Poin	85.5	60.11-60.35	59.95	86.00	60.17 - 62.04	61.39	
Angka Melek Huruf	Persen	98.00 - 98.50		98.29		98,50 - 99,00		98.78
Harapan Lama Sekolah		12.33-12.45		12.15		N/A		98.78
Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.73-7.76						
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota				8.06-10.78 (rata-rata : 9.82)		8,50 - 8,75	8,07-10,93 (rata-rata 9,92)	
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten				5.46-8.66 (rata - rata : 7.09)		10,25 - 11,75	5,63-8,89 (rata-rata : 7,22)	
APK Sekolah Menengah	Persen	87.48		61.19		92.80		0.00

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TAHUN 2015		TAHUN 2016	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Koperasi dan UMKM					
Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha	orang	7,25	8,365	7,75	
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
Skala Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintahan	Skala 1 - 4	4	3.00	4	3.21
Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan	Skala 1 - 7	3.5	4,795	4	4,975
Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum	Persen	63	62.58	65	
Indeks Persepsi Korupsi	Poin	6.5	n/a	7	
Indeks Kebahagiaan	Poin	59 - 61	68.28	61 - 63	68.28
Tingkat Harmonisasi kerukunan Antar Umat Beragama	Poin	4	n/a	4	N/A
Pekerjaan Umum					
Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemara sedang	Persen	10.8 - 11.2	23.45	11,2 - 11,7	
Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi	Persen	25.9 - 39.77	19.06	38.22	
Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Persen	67-72	69.65	76 - 81	
Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan	Persen	65 - 67	65.65	67 - 69	
Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	63 - 70	67.13	70 - 73	
Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	Persen	64 - 65	65.03	65 - 67	
Energi dan Sumber Daya Mineral					
Rasio Elektrifikasi Rumah	Persen	82 - 84	94.04	84 - 86	93.71
Sosial					
Jumlah PMKS yang ditangani	Orang	579.899	643.618	637.888	643,618
Jumlah Pekerja Anak	Orang	540.527	n/a	529.717	192,288
3. ASPEK DAYA SAING DAERAH					
Fokus Kemampuan Ekonomi					
Indeks Daya Beli	Poin	64.65	68.69-68.91	69.45	65.00 68.90 - 69.46 69.51
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen per Tahun	6.2 - 6.8	5.06 (5.04)	6,3 - 6,9	5,67
Laju Pertumbuhan Ekspor	Persen	6.5 - 7.0	15.05	7 - 7,5	3.34
Inflasi	Persen	6.3 - 7.3	2.73	4.5 - 5.5	2.75
Penanaman Modal					
Nilai Penanaman Modal Asing (PMA)	Trilyun Rupiah	75 - 85	71.7 (76.44)	85 - 95	72.87
Nilai Investasi/PMTB adhb	Trilyun Rupiah	198.6 - 208.6	396.36 (382.99)	226,4 - 246,4	412.30
Nilai Investasi PMA - PMDN	Trilyun Rupiah	96.81 - 107.79	121.5 (102.71)	107,79 - 121,80	103.23
Nilai Investasi PMDN	Trilyun	19 -21	49.8 (26.27)	21 - 23	30.36

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TAHUN 2015		TAHUN 2016	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
	Rupiah				
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
Jumlah Penerbitan Perijinan	Izin	47.224	16.840	51.946	
Indeks Demokrasi	Poin	67.00 - 67.50	71.52	67,00 - 67,50	73.04
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	70	72.99	75	
Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah	13.3	16.26	14.6	
Indikator Daya Saing Provinsi	Rangking	4-3	n/a	2-Mar	
Pendidikan					
APK Pendidikan Tinggi	Persen	18 - 19	17.47	19 - 20	
Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI	Buah	20	30	25	
Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahun ke atas	Orang	13,794,000	n/a	15,173,400	7,722,903
Kependudukan dan Cacatan Sipil					
Jumlah Penduduk	Jiwa	46,800,123	46,709,569	47,577,005	47,379,389.00
Lingkungan Hidup					
Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah	Persen	38 - 39	37.20	39 - 41	
Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen per Tahun	5-Apr	3.19 (belum termasuk bidang kehutanan)	6.00	
Pekerjaan Umum					
Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik & sedang)	Persen	97.2 - 97.5	97.80	97,3 - 97,6	
Pariwisata					
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	950	2,027,629	1,25	2,028
Kebudayaan					
Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional	Buah	1	1	7	8
Pemuda dan Olahraga					
Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional	Orang	3	0	3	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	72.02	n/a	73	

Keterangan Warna:

IPM Metode Baru

IPM Metode Baru Hasil Perhitungan sementara Pusdalisbang

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat ditetapkan berdasarkan rumusan isu strategis pembangunan daerah yang selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan program dan kegiatan pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat, dalam bingkai pencapaian misi pembangunan daerah, berdasarkan dokumen RPJMD Tahun 2013-2018, ditetapkan sebagai berikut :

A. Misi Pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing

1. Bidang Pendidikan, melalui strategi pertama, menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi dengan biaya terjangkau dengan arah kebijakan (1) pendidikan gratis Dasar dan Menengah (SD, SLTP, dan SLTA) dalam rangka Penuntasan Wajib Dikdas Dua Belas Tahun pada Tahun 2018; (2) peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah dan tinggi; (3) pendidikan terjangkau bagi anak-anak buruh dan TKI; (4) penyediaan beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, keluarga atlet berprestasi dan guru serta mahasiswa di PTN/PTS; (5) peningkatan akses transportasi sekolah di daerah terpencil. Strategi kedua, dengan arah kebijakan meningkatkan jumlah dan kualitas Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSNN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP dengan arah kebijakan perwujudan Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSNN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP yang berkualitas. Strategi ketiga, meningkatkan kompetensi guru dengan arah kebijakan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan. Strategi keempat, meningkatkan sarana prasarana pendidikan dan daya tampung SMP/MTS dan SMA/SMK/MA serta Pesantren dengan arah kebijakan peningkatan daya tampung SMP/MTS dan SMA/SMK/MA dan Pesantren melalui pembangunan RKB. Strategi kelima, mengembangkan pendidikan inklusif dengan arah kebijakan peningkatan pemerataan dan mutu Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan berkebutuhan khusus. Strategi keenam, menuntaskan buta aksara dengan arah kebijakan terwujudnya masyarakat Jawa Barat bebas dari buta aksara.
2. Bidang Kesehatan, melalui Strategi pertama, menguatkan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan dengan arah kebijakan peningkatan kemandirian masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan kesehatan lingkungan. Strategi kedua, meningkatkan pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular dengan arah kebijakan

Peningkatan pelayanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk masalah gizi masyarakat. Strategi ketiga, menguatkan pembiayaan, sumber daya manusia kesehatan, sarana dan prasarana dengan arah kebijakan peningkatan ketersediaan sumber daya kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. Strategi keempat, meningkatkan manajemen, regulasi, teknologi informasi kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan dengan arah kebijakan penguatan regulasi, tatakelola dan informasi kesehatan (fungsi stewardship) bidang kesehatan. Strategi kelima, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit dengan arah kebijakan peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dan rumah sakit untuk masyarakat umum dan rakyat miskin. Strategi keenam, meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan dengan arah kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan dan kesejahteraan tenaga kesehatan.

3. Bidang Ketenagakerjaan, melalui Strategi pertama, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan arah kebijakan peningkatan daya saing tenaga kerja. Strategi kedua, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dengan arah kebijakan perlindungan, pengawasan dan memberikan bantuan hukum bagi tenaga kerja Jawa Barat. Strategi ketiga, perluasan lapangan kerja dengan arah kebijakan (a) Peningkatan penempatan tenaga kerja; (b) Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat berkebutuhan khusus.
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui Strategi pertama, meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha bagi perempuan dengan arah kebijakan peningkatan upaya pemberdayaan, pengetahuan, keterampilan dan kemandirian perempuan. Strategi kedua, mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dengan arah kebijakan pemberdayaan gender/pemberdayaan perempuan. Strategi ketiga, mencegah perdagangan anak dan perempuan (trafficking) dengan arah kebijakan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (trafficking). Strategi keempat, mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) dengan arah kebijakan (a) terwujudnya kota dan kabupaten di Jawa Barat sebagai kota layak anak; (b) pengokohan ketahanan keluarga sebagai basis sosial.
5. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, melalui strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB dengan arah kebijakan revitalisasi Program Keluarga Berencana.

6. Bidang Perpustakaan, melalui strategi dukungan perpustakaan umum dan khusus di Jawa Barat dan meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan berbasis IT dengan arah kebijakan perwujudan masyarakat Jawa Barat gemar membaca.
7. Bidang Ketransmigrasian, melalui Strategi pertama, menata persebaran penduduk baik di dalam maupun ke luar wilayah provinsi, dengan arah kebijakan terwujudnya kerjasama bidang ketransmigrasian serta pengembangan kawasan transmigrasi. Strategi kedua, peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat transmigrasi lokal (resettlement) dengan arah kebijakan meningkatkan kemandirian masyarakat transmigrasi lokal.
8. Bidang Perumahan, melalui strategi meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan dengan arah kebijakan penyediaan rumah untuk rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR).

B. Misi Kedua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan

1. Bidang Pekerjaan Umum, melalui strategi meningkatkan ekonomi perdesaan dengan arah kebijakan (a) dukungan pembangunan jalan di sentra pertanian, wisata dan industri manufaktur; (b) dukungan sarana irigasi di sentra pertanian lahan sawah.
2. Bidang Ketenagakerjaan, melalui strategi memperluas kesempatan kerja dan penempatan dengan arah kebijakan penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
3. Bidang Penanaman Modal, melalui strategi meningkatkan investasi dengan arah kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif.
4. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, melalui Strategi pertama, meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM dengan arah kebijakan : (a) peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM; (b) peningkatan akses teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi Koperasi dan UMKM. Strategi kedua, meningkatkan produktivitas BUMD dan Lembaga Keuangan lainnya dengan arah kebijakan peningkatan peran kinerja dan daya saing BUMD.
5. Bidang Ketahanan Pangan, melalui strategi meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan, dengan arah kebijakan peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi pangan masyarakat dan penanganan daerah rawan pangan.
6. Bidang Pertanian, melalui Strategi pertama, meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan dan peternakan, dengan arah kebijakan; (a) peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan; (b) peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian,

perkebunan dan peternakan; (c) peningkatan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak; (d) pengembangan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk pertanian, perkebunan, dan peternakan. Strategi kedua, mempertahankan dan menggantikan luas baku lahan sawah yang beralih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dengan arah kebijakan mencetak lahan sawah baru untuk mencapai lahan pertanian berkelanjutan.

7. Bidang Perikanan dan Kelautan, melalui strategi, meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya dan tangkap serta pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan terutama perikanan komersil di Pantai Selatan dan Pantai Utara melalui gerakan pengembangan perikanan pantai utara dan pantai selatan (GAPURA) dengan arah kebijakan (a) peningkatan produksi perikanan dan kelautan; (b) peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan.
8. Bidang Kehutanan, melalui strategi meningkatkan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, dengan arah kebijakan peningkatan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
9. Bidang Pariwisata, melalui strategi meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli masyarakat, dengan arah kebijakan pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, ziarah) dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali.
10. Bidang Perindustrian, melalui strategi meningkatkan daya saing industri, dengan arah kebijakan (a) peningkatan unit usaha industri kecil menengah dan kemitraan antar industri; (b) peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi).
11. Bidang Perdagangan, melalui strategi, meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional, dengan arah kebijakan (a) peningkatan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri; (b) peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien; (c) penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan dan pasar tradisional.
12. Bidang Penataan Ruang, melalui strategi menguatkan ekonomi regional, dengan arah kebijakan (a) pengembangan Metropolitan Bodebek Karpur, Metropolitan Bandung Raya, dan Metropolitan Cirebon Raya; (b) pengembangan pusat pertumbuhan Pangandaran, Palabuhanratu, dan Rancabuaya.
13. Bidang Perhubungan, melalui strategi meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri, serta perlindungan

konsumen dan pasar tradisional, dengan arah kebijakan pengembangan sistem transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnya.

C. Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik

1. Bidang Perencanaan Pembangunan, melalui Strategi pertama, mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel dengan arah kebijakan (a) peningkatan kualitas perencanaan daerah; (b) peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan serta sistem pengawasan yang akuntabel; (c) mensinergikan perencanaan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Strategi kedua, Meningkatkan kerjasama pembangunan, dengan arah kebijakan : (a) peningkatan kerjasama kemitraan strategis lintas provinsi, pemerintahan pusat, dan kabupaten/kota; (b) peningkatan kualitas pengelolaan kerjasama Jawa Barat melalui aliansi strategis multi pihak dalam dan luar negeri.
2. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, melalui strategi mengendalikan dan menata kependudukan, dengan arah kebijakan: (1) penataan pengelolaan administrasi kependudukan; (2) peningkatan kualitas data kependudukan; (3) peningkatan kerjasama pengelolaan kependudukan.
3. Bidang Komunikasi dan Informatika, melalui strategi meningkatnya kualitas pelayanan publik serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dengan arah kebijakan peningkatan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik menuju cyber province.
4. Bidang Pertanahan, melalui strategi menata dan mengelola aset pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan arah kebijakan penataan dan penertiban administrasi pengelolaan aset daerah.
5. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, melalui Strategi pertama, Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik sebagai warga Negara, dengan arah kebijakan (a) peningkatan fungsi partai politik dalam pendidikan politik; (b) peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik; (c) peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu. Strategi kedua, memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara, dengan arah kebijakan peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara.
6. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, melalui Strategi pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemerintahan daerah, dengan arah kebijakan (a) peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi; (b) peningkatan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja; (c) peningkatan

kapasitas lembaga legislatif; (d) peningkatan intensitas komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD. Strategi kedua, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan arah kebijakan (a) penataan struktur organisasi yang proporsional; (b) peningkatan pelayanan administrasi organisasi; (c) penuntasan kejelasan batas administrasi daerah; (d) percepatan penanganan dan pelayanan kepada masyarakat; (e) peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pengembangan zona integritas; (f) pengelolaan kearsipan yang mendukung pengelolaan kerarsipan daerah; (g) pengaturan teknis pengelolaan keuangan daerah; (g) peningkatan pelayanan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah; (h) mempertahankan status laporan pertanggungjawaban perhitungan APBD Wajar Tanpa Pengecualian; (i) peningkatan penerimaan daerah sesuai dengan potensi; (j) peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dalam menyelesaikan aset-aset daerah yang bermasalah. Strategi ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, dengan arah kebijakan (a) peningkatan kualitas pelayanan bergerak (Mobile Services); (b) peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparat. Strategi keempat, menata sistem hukum di daerah, dengan arah kebijakan (a) menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan; (b) peningkatan penyelarasan peraturan daerah; (c) peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya. Strategi kelima, meningkatkan budaya taat hukum, dengan arah kebijakan Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan hukum dan HAM. Strategi keenam, meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan arah kebijakan (a) peningkatan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya; (b) peningkatan kuantitas dan kualitas Pol PP dan PPNS se-Jawa Barat. Strategi ketujuh, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik sebagai warga negara dengan arah kebijakan (a) peningkatan fungsi partai politik dalam pendidikan politik; (b) peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik; (c) peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu. Strategi kedelapan, memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara dengan arah kebijakan peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara.

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melalui strategi meningkatkan kapasitas Pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat, dengan arah kebijakan (a) peningkatan kinerja pemerintahan desa melalui pemberian insentif dan fasilitas kerja bagi aparatur pemerintahan desa dan kelurahan se-Jawa Barat; (b) peningkatan pembinaan bagi aparat desa; (c) peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; (d) meningkatkan infrastruktur perdesaan.

8. Bidang Statistik, melalui strategi meningkatkan pengelolaan satu data pembangunan dengan arah kebijakan mewujudkan pengelolaan data yang akurat, relevan dan terkini untuk mendukung proses perencanaan pembangunan Jawa Barat.
 9. Bidang Kearsipan, melalui strategi mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah dengan arah kebijakan penataan arsip daerah.
- D. Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan
1. Bidang Lingkungan Hidup, melalui Strategi pertama, menurunkan beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana dengan arah kebijakan (a) peningkatan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3 secara terpadu; (b) peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Strategi kedua, meningkatkan kualitas dan fungsi kawasan lindung dengan arah kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan kawasan lindung hutan dan non hutan. Strategi ketiga, meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup dengan arah kebijakan: (a) peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati; dan (b) peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir dan laut.
 2. Bidang Pekerjaan Umum, melalui Strategi pertama, meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang, dengan arah kebijakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Strategi kedua, meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air dengan arah kebijakan : (a) peningkatan konservasi sumber daya air; (b) peningkatan pendayagunaan sumber daya air; dan (c) peningkatan pengendalian daya rusak air. Strategi ketiga, meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman dengan arah kebijakan (a) peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air bersih, dan wilayah tertinggal; (b) peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah Metropolitan; (c) peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik; (d) peningkatan teknologi pengolahan dan cakupan layanan persampahan; (e) peningkatan ketersediaan drainase perkotaan; dan (f) pengembangan lingkungan permukiman sehat. Strategi keempat, meningkatkan pelayanan jasa konstruksi dan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah Negara dengan arah kebijakan: (a) peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi; dan (b) peningkatan pengelolaan bangunan gedung/rumah negara.

3. Bidang Penataan Ruang, melalui strategi, meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing dengan arah kebijakan: (a) perwujudan harmonisasi dalam pemanfaatan, penataan dan pengendalian ruang pada seluruh Kawasan Strategis Provinsi (KSP); (b) peningkatan kinerja perencanaan ruang; (c) peningkatan kinerja pemanfaatan ruang; dan (d) peningkatan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang.
 4. Bidang Perumahan, melalui strategi, meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan dengan arah kebijakan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian.
 5. Bidang Perhubungan, melalui strategi mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta mengembangkan sistem transportasi publik regional yang nyaman dengan arah kebijakan: (a) pengembangan sistem transportasi darat dan perkeretaapian serta sistem transportasi massal (Mass Rapid Transport); (b) pengembangan sistem transportasi udara; (c) pengembangan sistem transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnya; dan (d) peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan.
 6. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, melalui Strategi pertama meningkatkan penyediaan infrastruktur energi ketenagalistrikan, dengan arah kebijakan meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan. Strategi kedua, mengembangkan sumber energi baru terbarukan dan konservasi energi, sumber daya mineral, geologi dan air tanah, dengan arah kebijakan (a) meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan; (b) meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber energi panas bumi; (c) Meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya mineral, geologi, dan air tanah; (d) meningkatkan pengusahaan dan nilai tambah produksi sumber daya mineral. Strategi ketiga, optimalisasi penanganan dan mitigasi bencana alam geologi, dengan arah kebijakan pengembangan upaya penanganan dan mitigasi bencana alam geologi.
- E. Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal
1. Bidang Pemuda dan Olah Raga, melalui Strategi pertama, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga dengan arah kebijakan pendukung pembangunan gelanggang olah raga di kota/kabupaten. Strategi kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan dengan arah kebijakan peningkatan pembinaan olahragawan. Strategi ketiga, meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam berolahraga dengan arah kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Strategi keempat, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri dengan arah kebijakan (a) Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan; dan (b) peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif.

2. Bidang Kebudayaan, melalui Strategi pertama, peningkatan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah dengan arah kebijakan perlindungan budaya lokal. Strategi kedua, peningkatan apresiasi masyarakat terhadap aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya daerah, dengan arah kebijakan terwujudnya Jawa Barat sebagai pusat budaya. Strategi ketiga, peningkatan perlindungan dan pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Jawa Barat dengan arah kebijakan mengembangkan Pusat Gelar Karya Seni dan Budaya Berkelas Dunia untuk berbagai Pentas Karya Seni. Strategi keempat, peningkatan pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam bidang seni dan budaya, dengan arah kebijakan meningkatnya perlindungan seni dan budaya daerah. Strategi kelima, peningkatan apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta dengan arah kebijakan terwujudnya Jawa Barat sebagai pusat kreasi bangsa.
3. Bidang Sosial, melalui Strategi pertama, mengurangi permasalahan sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya, dengan arah kebijakan (a) meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS dan penghargaan kepada para Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI)/Janda PKRI dan keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawan sosial; (b) Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial; Strategi kedua, meningkatkan peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS, dengan arah kebijakan pendayagunaan dan pemberdayaan PSKS dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial.
4. Bidang Agama, melalui Strategi pertama, meningkatkan kerukunan antar agama dan pemahaman pengamalan agama, dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik inter umat beragama. Strategi kedua, meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan, dengan arah kebijakan penguatan lembaga keagamaan.

2.3. Prioritas Daerah

Pencapaian misi pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 diwujudkan melalui pendekatan 10 (sepuluh) Common Goals, kegiatan tematik sektoral dan kegiatan tematik kewilayahan sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan, dengan sasaran:
 - a. Menyelenggarakan pendidikan formal dasar dan menengah, dengan kegiatan tematik adalah Jabar bebas putus jenjang sekolah;
 - b. Menyelenggarakan pendidikan nonformal Paket A, B dan C plus kewirausahaan dan Keaksaraan Fungsional (KF), dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan pelayanan pendidikan nonformal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas;
 - c. Mengembangkan pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusif, dengan kegiatan tematik adalah Pendidikan berkebutuhan khusus;
 - d. Menyelenggarakan pendidikan tinggi, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi;
 - e. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik.

2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan pada Puskesmas dan RSUD, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan;
 - b. Menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi, dengan kegiatan tematik adalah Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak;
 - c. Terwujudnya sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjang, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit Jiwa;
 - d. Meningkatnya upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, dengan kegiatan tematik adalah Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

3. Mengembangkan infrastruktur wilayah, energi dan air baku, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya efektivitas pergerakan orang, barang dan jasa di pusat kegiatan ekonomi, dengan kegiatan tematik adalah Penanganan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya

- b. Tersedianya infrastruktur strategis pendukung pengembangan wilayah dan kegiatan ekonomi, dengan kegiatan tematik adalah Pembangunan dan pengembangan infrastruktur strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-Tasikmalaya serta Jabar Selatan
 - c. Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah Infrastruktur jalan dan perhubungan
 - d. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi sebagai penyedia air baku serta pengendali banjir dan kekeringan, dengan kegiatan tematik adalah Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis;
 - e. Terwujudnya pengembangan Kawasan Industri Terpadu dan pengembangan infrastruktur permukiman dan perumahan, dengan kegiatan tematik adalah Kawasan Industri Terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan;
 - f. Terwujudnya pengembangan energi baru terbarukan, dengan kegiatan tematik adalah Jawa Barat mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik; dan
 - g. Terwujudnya pemenuhan pengembangan penyediaan air baku, dengan kegiatan tematik adalah Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat.
4. Meningkatkan ekonomi pertanian, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya produksi benih/bibit di Jawa Barat, dengan kegiatan tematik adalah Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional;
 - b. Mengembangkan produk pertanian Jawa Barat, dengan kegiatan tematik adalah Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry;
 - c. Terwujudnya pengelolaan luas lahan pertanian berkelanjutan dan pengendalian stok pangan serta keanekaragaman bahan pangan pada sentra produksi, dengan kegiatan tematik adalah Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani;
 - d. Terkendalinya Tingkat Kerawanan Pangan dan Kecukupan Gizi Masyarakat, dengan kegiatan tematik adalah Jawa Barat bebas rawan pangan;
 - e. Meningkatnya dukungan infrastruktur di sentra produksi pangan, dengan kegiatan tematik adalah Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi pangan.

5. Meningkatkan ekonomi non pertanian, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan peningkatan kemampuan tenaga kerja, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM;
 - b. Meningkatnya perbaikan iklim usaha yang kondusif untuk mempertahankan dan menumbuhkan investasi, dengan kegiatan tematik adalah Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi;
 - c. Meningkatnya peran kelembagaan keuangan perbankan dan non perbankan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, dengan kegiatan tematik adalah Pengembangan skema pembiayaan alternatif;
 - d. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yang bernilai tambah dan berdaya saing, dengan kegiatan tematik adalah Pengembangan industri manufaktur;
 - e. Meningkatnya industri kreatif dan penumbuhan wirausahawan muda kreatif, dengan kegiatan tematik adalah Pengembangan industri kreatif dan wirausahawan muda kreatif.

6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya luas dan fungsi kawasan lindung serta berkurangnya luasan lahan kritis, dengan kegiatan tematik adalah Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45%;
 - b. Meningkatnya kualitas udara dan air serta pengelolaan sampah terpadu, dengan kegiatan tematik adalah Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestik dan pengelolaan sampah regional;
 - c. Meningkatnya efektivitas mitigasi dan percepatan penanganan bencana, dengan kegiatan tematik adalah Penanganan bencana longsor dan banjir.

7. Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan, dan olahraga dengan sasaran:
 - a. Meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana olahraga bertaraf internasional dan Kepemudaan, dengan kegiatan tematik adalah Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan;
 - b. Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya di Jawa Barat, dengan kegiatan tematik adalah Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya di Jawa Barat;
 - c. Meningkatnya Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya di Jawa Barat, dengan kegiatan tematik adalah gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat;

- d. Meningkatnya Pengembangan destinasi wisata, dengan kegiatan tematik adalah Pengembangan destinasi wisata.
8. Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya ketahanan keluarga dan keluarga berencana, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana;
 - b. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pengkohan ekonomi keluarga, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga;
 - c. Meningkatnya pengelolaan kependudukan, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan pengelolaan kependudukan.
 9. Menanggulangi kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keamanan, dengan sasaran:
 - a. Menurunnya penduduk miskin di Jawa Barat, dengan kegiatan tematik adalah Pengurangan kemiskinan;
 - b. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan sosial, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS;
 - c. Terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan ketenteraman dan keamanan masyarakat.
 10. Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance, dengan kegiatan tematik adalah Modernisasi pemerintahan dan profesionalisme aparatur;
 - b. Meningkatnya pelayanan data informasi kepada masyarakat, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi publik;
 - c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik, hukum, ketertiban dan keamanan masyarakat serta peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan, dengan kegiatan tematik adalah Penataan sistem hukum dan penegakan hukum;
 - d. Meningkatnya harmonisasi pembangunan antar wilayah dan wilayah perbatasan, dengan kegiatan tematik adalah Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak;
 - e. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan;
 - f. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pemerintahan, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan dan Desa.



Gambar 2.1 Common Goal Tahun 2013-2018

Disamping kegiatan-kegiatan sebagaimana dijelaskan di atas, diselenggarakan juga kegiatan-kegiatan yang menjadi pendukung bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemenuhan belanja tetap yang mengikat OPD, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat sektoral atau rintisan yang dikategorikan sebagai Non-Common Goals (Differential Goals). Rencana kerja Non-Common Goals adalah merupakan rencana kerja penunjang yang bukan merupakan kegiatan prioritas pembangunan. Rencana kerja Non-Common Goals diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung operasional dan peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Non-Common Goals adalah kegiatan tetap yang mengikat (fixed cost) dan kegiatan rutin (regular cost). Cakupan kegiatan tetap yang mengikat yaitu kegiatan yang harus dialokasikan oleh OPD karena merupakan kebutuhan dasar untuk operasional dan penunjang kinerja OPD. Sedangkan kegiatan rutin adalah kegiatan yang merupakan pelaksanaan tugas fungsi OPD yang bukan kegiatan unggulan namun berdampak luas apabila tidak diselenggarakan.

2.4. Janji Gubernur

Ruang lingkup dari janji program/kegiatan Gubernur Jawa Barat pada masa jabatan Tahun 2013 – 2018 adalah:

1. Pendidikan gratis SD, SLTP dan SLTA di seluruh Jawa Barat.
2. Beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, serta keluarga atlet berprestasi dan guru.
3. Revitalisasi posyandu dan dana operasional kader posyandu.

4. Membuka 2 juta lapangan kerja baru dan mencetak 100.000 wirausahawan baru Jawa Barat.
5. Alokasi 4 triliun untuk infrastruktur desa dan perdesaan.
6. Rehabilitasi 100.000 rumah rakyat miskin.
7. Pembangunan pusat seni dan budaya Jawa Barat di kabupaten/kota.
8. Pembangunan gelanggang olahraga di kabupaten/kota.

2.5. Prioritas Kewilayahan

Fokus pembangunan kewilayahan di Jawa Barat pada Tahun 2016 adalah pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta kawasan strategis berdasarkan pembagian peran strategis pembangunan kewilayahan, dengan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi strategis dan kawasan sekitarnya. Beberapa kebijakan pembangunan kewilayahan, yaitu :

1. Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana, terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor, yang tertuang dalam suatu rencana tata ruang. Selanjutnya, rencana tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan setiap sektor agar pemanfaatan ruang menjadi sinergis, serasi dan berkelanjutan;
2. Peningkatan percepatan pembangunan wilayah tertinggal agar dapat sejajar dengan wilayah lainnya melalui pendekatan peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana;
3. Peningkatan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan perkotaan diarahkan agar menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan, sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang menjadi pusat produksi agroindustri/agropolitan dan sektor lainnya. Peningkatan pembangunan desa di wilayah perbatasan dilaksanakan melalui tematik wilayah perbatasan, antara lain : Peningkatan kebutuhan ruang kelas dan tenaga pengajar dalam rangka mendukung program wajib belajar 9 tahun; Ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di perbatasan; Penguatan infrastruktur jalan dan jembatan lintas perbatasan; Peningkatan pendapatan masyarakat daerah perbatasan melalui pengembangan kewirausahaan dan komoditas unggulan; Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan publik dan terjaminnya ketersediaan layanan listrik dan air bersih.

4. Peningkatan kerjasama antar daerah khususnya di kawasan Metropolitan dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi untuk menciptakan sinergitas dan integrasi wilayah, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya.
5. Peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan dengan arah kebijakan wilayah sebagai berikut:
 - a. Wilayah Jabodetabekjur :
 - 1) Penguatan kelembagaan dengan fokus pada revitalisasi kelembagaan BKSP Jabodetabekjur;
 - 2) Penataan ruang dengan fokus sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Jabodetabekjur;
 - 3) Pengembangan transportasi regional dengan fokus pembangunan jaringan moda angkutan massal;
 - 4) Penataan sumber daya air dengan fokus penataan Daerah Aliran Sungai (DAS), pengamanan air baku, serta pembangunan dan rehabilitasi situ/waduk;
 - 5) Pengembangan pengelolaan persampahan dengan fokus pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan;
 - 6) Penanganan pendidikan dengan fokus pembangunan sarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru;
 - 7) Penanganan kesehatan dengan fokus penyediaan sarana kesehatan dan penanggulangan penyakit menular;
 - 8) Pengembangan ekonomi dengan fokus penetapan dan pemanfaatan kawasan ekonomi khusus;
 - 9) Pengembangan agribisnis dengan fokus pembangunan rumah potong hewan regional, pelelangan ikan regional dan pasar induk regional, serta kawasan pengembangan peternakan sapi potong;
 - 10) Penanganan tenaga kerja, kependudukan dan sosial dengan fokus pembangunan sistem informasi kependudukan Jabodetabekjur dan pembangunan informasi tenaga kerja.
 - b. Wilayah perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah :
 - 1) Bidang Sosial dan Pemerintahan:
 - a) Kesehatan, dengan fokus penanganan keluarga miskin;
 - b) Pendidikan, dengan fokus praktek kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pendataan siswa;
 - c) Batas wilayah, dengan fokus penetapan batas wilayah dan pembangunan tugu batas.

- 2) Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup :
 - a) Penataan ruang dan permukiman, dengan fokus koordinasi penataan ruang;
 - b) Lingkungan hidup, dengan fokus pengelolaan daerah aliran sungai;
 - c) Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan fokus pembangunan bendung/waduk dan normalisasi sungai serta rehabilitasi jaringan irigasi;
 - d) Infrastruktur jalan dan jembatan, dengan fokus pembangunan dan peningkatan jalan serta pembangunan jembatan;
 - e) Perhubungan, dengan fokus pembangunan PJU serta sinkronisasi fungsi dan kelas jalan.
 - 3) Bidang Ekonomi :
 - a) Pertanian, dengan fokus pemberantasan hama, pertanian multi aktivitas (padi – ternak), serta relokasi dan optimalisasi check point ternak dan hasil hutan;
 - b) Perdagangan dan jasa, dengan fokus pembangunan dan penataan pasar kecamatan;
 - c) Pariwisata, dengan fokus koordinasi dan pengembangan paket wisata.
- c. Wilayah Perbatasan Jawa Barat - Banten :
- 1) Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerintahan :
 - a) Kesehatan, dengan fokus penanganan keluarga miskin dan penyakit menular;
 - b) Pendidikan, dengan fokus penanganan keluarga miskin, peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru;
 - c) Sosial, dengan fokus perlindungan masyarakat adat 'kakolotan' ;
 - d) Batas wilayah, dengan fokus penataan dan penetapan batas wilayah provinsi, pembangunan pilar dan gapura batas wilayah;
 - e) Kerjasama Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien di Daerah yang berbatasan.
 - 2) Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah :
 - a) Penataan ruang dan permukiman, dengan fokus koordinasi penataan ruang perbatasan dan pengendalian lingkungan hidup serta penyediaan rumah layak huni;
 - b) Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan fokus pembangunan bendung/waduk, normalisasi sungai, rehabilitasi jaringan irigasi dan penyediaan prasarana dan sarana air bersih;
 - c) Infrastruktur jalan dan jembatan, dengan fokus pembangunan, peningkatan jalan dan peningkatan status jalan serta pembangunan jembatan;

- d) Perhubungan, dengan fokus pengendalian muatan lebih dan penataan terminal serta trayek angkutan.
- 3) Bidang Ekonomi :
- a) Perdagangan dan jasa, dengan fokus pengembangan pusat pemasaran dan pembinaan KUMKM;
 - b) Pariwisata, dengan fokus penataan kawasan wisata dan pengembangan paket-paket wisata;
 - c) Ketenagakerjaan, dengan fokus memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan (masyarakat berbudaya kerja).

Selanjutnya, ruang lingkup pembangunan berbasis kewilayahan (tematik kewilayahan) diselenggarakan berdasarkan Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) di Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

A. WKPP I (Wilayah Bogor)

1. Mengembangkan sentra ternak sapi potong, sapi perah, ayam ras dan unggas lokal;
2. Mengembangkan agribisnis ikan air tawar, dan ikan hias untuk pasar regional dan global;
3. Mengembangkan pusat pemuliaan padi varietas pandan wangi dan varietas unggul lainnya;
4. Mengembangkan agrowisata koridor Bogor–Puncak-Cianjur; ekowisata pemandangan alam dan bahari koridor Bogor, Sukabumi Pelabuhan Ratu dan mengelola cagar biosfer Cibodas;
5. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru (growth center) Pelabuhan Ratu dan Metropolitan BODEBEK KARPUR.

B. WKPP II (Wilayah Purwakarta)

1. Mengembangkan industri manufaktur;
2. Mengembangkan industri keramik dan gerabah;
3. Mengembangkan industri perberasan dan makanan, olahan berbasis bahan baku lokal, perkebunan, budidaya ikan air tawar dan air payau, serta ternak sapi perah, sapi potong, kambing/domba, ayam ras serta unggas lokal;
4. Mengembangkan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah);
5. Mengembangkan metropolitan BODEBEK KARPUR.

C. WKPP III (Wilayah Cirebon)

1. Mengembangkan industri mangga gedong gincu dan industrialisasi perikanan ;
2. Mengembangkan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija;
3. Mengembangkan industri batik dan rotan, serta industri makanan olahan berbahan baku lokal;
4. Melestarikan keraton, wisata sejarah, wisata ziarah (pilgrimage) dan mengembangkan ekowisata;
5. Mengembangkan Metropolitan Cirebon Raya serta Kawasan BIJB dan Aerocity Kertajati.

D. WKPP IV (Wilayah Priangan)

1. Mengembangkan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu di Jatinangor;
2. Mengembangkan klaster unggas, perikanan budidaya air tawar dan tangkap, serta ternak sapi perah, sapi potong, Domba Garut, kambing dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak;
3. Mengembangkan produksi tanaman industri (kopi, teh, kakao, karet, atsiri) dan hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias) yang berorientasi ekspor;
4. Mengembangkan jasa perdagangan, industri kreatif dan pariwisata;
5. Mengembangkan Metropolitan Bandung Raya, pusat pertumbuhan baru (growth center) Pangandaran dan Rancabuaya.

Penyelenggaraan kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan di Provinsi Jawa Barat selaras dengan kebijakan pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, dalam rangka kebijakan pembangunan kewilayahan, Pemerintah telah menetapkan kawasan strategis nasional di Provinsi Jawa Barat, yaitu :

1. Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur termasuk Kepulauan Seribu;
2. Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
3. Kawasan Uji Coba Terbang Roket Pameungpeuk;
4. Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pameungpeuk;
5. Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Tanjungsari;
6. Kawasan Stasiun Telecomand;
7. Kawasan Stasiun Bumi Penerima Satelit Mikro;
8. Kawasan Pangandaran - Kalipucang - Segara Anakan - Nusa Kambangan.

Selanjutnya, Pemerintah telah menetapkan Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah, sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), terdiri dari :
 - a. PKN Jabodetabek, meliputi Provinsi Jabar, DKI dan Banten;
 - b. PKN Bandung Raya;
 - c. PKN Cirebon.
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), terdiri dari :
 - a. PKW Sukabumi;
 - b. PKW Palabuhanratu;
 - c. PKW Cikampek - Cikopo;
 - d. PKW Kadipaten;
 - e. PKW Pangandaran;
 - f. PKW Indramayu;
 - g. PKW Tasikmalaya;

Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat Tahun 2009-2029 ditetapkan Pusat Kegiatan Nasional Provinsi (PKNP) Palabuhanratu dan Pangandaran, serta kebijakan pembangunan kewilayahan berdasarkan Wilayah Pengembangan yang ditentukan dengan memperhatikan potensi wilayah, aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi, serta perkembangan daerah sekitar yang tetap harus dipertahankan. Pembangunan wilayah pengembangan ditekankan pada peningkatan kegiatan ekonomi yang diharapkan memberikan peningkatan kesejahteraan rakyat, dengan kebijakan sebagai berikut :

- A. Wilayah Pengembangan Bodebepunjur (Kabupaten dan Kota Bogor, Bekasi, Kota Depok, dan kawasan Puncak di Kabupaten Cianjur), difokuskan pada:
 - 1) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
 - 2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - 3) Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani);
 - 4) Peningkatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
 - 5) Pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan;
 - 6) Peningkatan fungsi kawasan lindung;
 - 7) Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - 8) Pengembangan energi baru terbarukan;
 - 9) Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
 - 10) Peningkatan investasi padat karya;
 - 11) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan;
 - 12) Pengendalian pencemaran air;
 - 13) Penataan daerah otonom.
- B. Wilayah Pengembangan Sukabumi (Kabupaten dan Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur), difokuskan pada :

- 1) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
 - 2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - 3) Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi dan protein hewani);
 - 4) Peningkatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
 - 5) Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - 6) Pengembangan energi baru terbarukan
 - 7) Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
 - 8) Penataan daerah otonom.
 - 9) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir.
- C. Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning (Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Majalengka dan Kuningan), difokuskan pada :
- 1) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
 - 2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
 - 3) Peningkatan investasi;
 - 4) Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani);
 - 5) Peningkatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
 - 6) Peningkatan fungsi kawasan lindung;
 - 7) Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
 - 8) Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - 9) Pengembangan energi baru terbarukan
 - 10) Pembangunan infrastruktur transportasi;
 - 11) Penataan daerah otonom.
- D. Wilayah Pengembangan Bandung Raya (Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian Kabupaten Sumedang), difokuskan pada:
- 1) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
 - 2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - 3) Pengendalian pencemaran (air, udara dan sampah);
 - 4) Pembangunan infrastruktur transportasi;
 - 5) Pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan;
 - 6) Peningkatan mutu air baku;
 - 7) Pengendalian pencemaran air;
 - 8) Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
 - 9) Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - 10) Pengembangan energi baru terbarukan;
 - 11) Pengembangan jasa dan perdagangan;
 - 12) Penataan daerah otonom.

- E. Wilayah Pengembangan Priangan Timur - Pangandaran (Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Pangandaran), difokuskan pada :
- 1) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
 - 2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - 3) Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani);
 - 4) Peningkatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
 - 5) Peningkatan fungsi kawasan lindung;
 - 6) Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - 7) Pengembangan energi baru terbarukan;
 - 8) Pengembangan pariwisata berbasis biodiversity;
 - 9) Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
 - 10) Penataan daerah otonom.
- F. Wilayah Pengembangan Purwasuka (Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang), difokuskan pada:
- 1) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
 - 2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - 3) Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani);
 - 4) Peningkatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
 - 5) Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - 6) Pengembangan energi baru terbarukan;
 - 7) Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
 - 8) Penataan daerah otonom;
 - 9) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir.